

Kebijakan Hilirisasi Industri Kakao di Indonesia

Diany Faila Sophia Hartatri¹⁾

¹⁾Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jl. PB. Sudirman 90 Jember 68118

Kebijakan hilirisasi kakao diterapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu upaya meningkatkan nilai tambah, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan nasional. Pengembangan hilirisasi industri pengolahan kakao ditujukan untuk menghasilkan produk setengah jadi seperti: bubuk kakao dan lemak kakao; produk makanan dan minuman berbasis kakao siap konsumsi; suplemen; dan pangan fungsional berbasis kakao.

Penciptaan kedaulatan pangan dan kedaulatan ekonomi bagi bangsa Indonesia memerlukan sinergitas dengan pelaku industri manufaktur. Hal ini disebabkan industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang memiliki *multiplier effects* tertinggi terhadap perekonomian yang juga sekaligus berperan sebagai penggerak utama dalam pengembangan pengetahuan, informasi, dan penyedia lapangan kerja. Di Indonesia, pada tahun 2010 industri manufaktur telah memberikan peluang kerja bagi lebih dari 476 juta orang. Namun demikian, kegiatan dalam manufaktur bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya tekanan pasar, kemampuan sumber daya dan produksi, globalisasi, *global value chain*, peningkatan pemanfaatan teknologi digital dan adanya perjanjian perdagangan dunia.

Industri kakao termasuk salah satu sektor prioritas yang harus dikembangkan sesuai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menginisiasi kebijakan hilirisasi produk pertanian melalui Kementerian Perindustrian sejak tahun 2010. Penerapan kebijakan ini dilatarbelakangi karena sudah puluhan tahun Indonesia melakukan ekspor

komoditas perkebunan dalam bentuk bahan mentah. Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi diperlukan agar terjadi peningkatan pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi maupun produk siap konsumsi di dalam negeri. Maksud penerapan kebijakan hilirisasi industri adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, mendapatkan nilai tambah produk khususnya bagi pelaku agribisnis, memberikan jaminan pasar, menyediakan lapangan kerja, dan memberi peluang usaha di Indonesia. Di samping itu, kebijakan hilirisasi juga diterapkan untuk meminimalisasi dampak serius penurunan harga komoditas. Sehingga, pada akhirnya hilirisasi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Di pasar dunia, komoditas perkebunan yang diekspor Indonesia umumnya memiliki daya saing yang rendah karena produk perkebunan diekspor masih dalam bentuk produk mentah. Komoditas kakao merupakan salah satu dari beberapa komoditas perkebunan unggulan di Indonesia. Kontribusi Indonesia sebagai penghasil kakao terbesar ketiga di dunia, setelah Ghana dan Cote d'Ivoire (Pantai Gading) cukup signifikan, yaitu sekitar 10% dari total produksi kakao dunia. Di mana, selama kurun waktu 2004-2010, sekitar 70% dari total ekspor kakao Indonesia berupa

biji kakao¹⁾. Namun demikian, daya saing produk biji kakao Indonesia masih dapat dikatakan rendah karena umumnya Indonesia mengekspor kakao dalam bentuk mentah (primer) yaitu biji kakao kering tanpa fermentasi (*unfermented dried cocoa beans*), sehingga di negara-negara industri kakao, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China, kakao Indonesia hanya dijadikan sebagai bahan campuran. Hal tersebut berpengaruh terhadap harga biji kakao di Indonesia, di mana harga biji kakao Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara eksportir lainnya. Di samping itu, perdagangan biji kakao di pasar dunia juga belum dapat merespon permintaan pasar, terutama pasar Amerika Serikat dan ASEAN yang mampu menyerap biji kakao Indonesia sebanyak lebih dari 80%²⁾. Dengan demikian, untuk meningkatkan daya saing biji kakao Indonesia di pasar dunia diperlukan berbagai upaya peningkatan mutu biji kakao melalui proses fermentasi dan penanganan pasca panen yang lainnya sesuai dengan permintaan pasar negara-negara tujuan ekspor.

Produk Olahan Kakao Indonesia dalam Neraca Perdagangan

Sementara itu dalam neraca perdagangan kakao untuk produk olahan berupa kakao pasta, Indonesia menempati peringkat ketujuh dengan pangsa pasar sebesar 3%. Sedangkan, untuk produk setengah jadi lainnya, misalnya kakao bubuk dan lemak kakao, Indonesia menempati peringkat ke 6 dan 5, masing-masing dengan pangsa pasar sebesar 5% dan 6%. Rendahnya pangsa pasar produk hilir kakao tersebut menunjukkan bahwa industri hilir kakao di Indonesia belum berkembang dengan baik. Meskipun demikian, hasil analisis daya saing produk olahan Indonesia dengan menggunakan metode *Export Product Dynamics* (EPD) menunjukkan bahwa daya saing produk olahan kakao seperti kakao pasta, lemak kakao, dan kakao bubuk tanpa tambahan memiliki daya saing yang tinggi dan dinamika perdagangan cenderung bersifat positif²⁾ di pasar-pasar negara tujuan ekspor utama.

Oleh karena rendahnya daya saing produk biji kakao dan juga perdagangan biji kakao tersebut yang bersifat inelastis, sedangkan daya

saing produk olahan kakao Indonesia di negara-negara tujuan ekspor utama yang relatif tinggi. Maka, hal tersebut merupakan salah satu alasan dasar diperlukannya pengembangan industri hilir kakao³⁾. Dengan demikian, diperlukan kebijakan guna mendorong kemajuan industri hilir kakao di Indonesia⁴⁾, dengan tujuan untuk mendorong peningkatan pendapatan petani^{5,6,7,8)} dan nasional melalui nilai tambah. Pengembangan industri hilir kakao di Indonesia masih memiliki prospek yang cerah karena berlimpahnya bahan baku dan juga tenaga kerja. Dengan demikian, hal tersebut berpeluang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap devisa negara dan penyerapan tenaga kerja karena memiliki keterkaitan yang luas baik di sektor hulu maupun hilir.

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan pengembangan industri hilir kakao sejak awal tahun 2000. Namun, baru tahun 2010-an diterbitkan kebijakan-kebijakan yang mendukung berkembangnya industri pengolahan kakao, seperti dihapuskannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% pada tahun 2007 khususnya bagi biji kakao dalam negeri. Selain itu, penerapan program hilirisasi di Indonesia ditandai dengan pemberlakuan kebijakan pajak ekspor atau bea keluar biji kakao yang lazim disebut dengan BK kakao. Kebijakan BK kakao ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan BK dan Tarif BK. Di mana, besarnya tarif BK dan harga patokan ekspor biji kakao ditentukan berdasarkan harga rata-rata di pasar internasional, terutama harga rata-rata CIF di terminal New York.

Kebijakan penghapusan PPN bertujuan untuk meningkatkan pasokan biji kakao bagi industri kakao di dalam negeri, sedangkan penerapan BK kakao dilakukan untuk menghambat ekspor terhadap biji kakao mentah dan sebaliknya mendorong peningkatan ketersediaan biji kakao bagi industri di dalam negeri. Akan tetapi, penghapusan PPN ternyata belum dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif pada sektor pengolahan kakao. Hal tersebut tampak dari 40 industri pengolahan kakao yang sebelumnya eksis, pasca penghapusan PPN hanya 15 industri pengolahan yang dapat bertahan, bahkan hanya lima diantaranya yang dapat beroperasi dengan baik⁹⁾. Selanjutnya, pemerintah secara resmi memberlakukan

kebijakan BK kakao pada 1 April 2010. Melalui pemberlakuan kebijakan ini diharapkan akan meningkatkan utilisasi produksi pengolahan biji kakao dikarenakan pelaku usaha melakukan kegiatan pengolahan kakao sebelum produk kakao diekspor. Sehingga, geliat industri kakao dan nilai tambah biji kakao dapat meningkat. Di samping itu, dengan adanya kebijakan BK kakao juga diharapkan dapat mendorong petani melakukan proses fermentasi.

Dampak Penerapan Bea Keluar Kakao (BK Kakao) Terhadap Program Hilirisasi Industri Kakao

Industri pengolahan biji kakao di Indonesia mengalami peningkatan sejak diberlakukannya BK kakao. Tahun 2005-2010 terjadi peningkatan industri pengolahan hingga mencapai 20% per tahun. Sejak diberlakukannya BK kakao, struktur produksi kakao Indonesia mengalami perubahan, dimana kontribusi produksi kakao olahan meningkat hingga mencapai 41% dari total

produksi biji kakao. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan sebelumnya, di mana sekitar 75% ekspor kakao Indonesia dalam bentuk biji kakao mentah. Sebaliknya, ekspor produk kakao olahan mengalami peningkatan, yaitu 196.333 ton pada tahun 2013. Pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing meningkat menjadi 242.080 ton dan 287.192 ton. Kegiatan pengolahan biji kakao di dalam negeri tersebut selain dipicu adanya kebijakan BK kakao juga dikarenakan meningkatnya permintaan produk kakao olahan dari berbagai industri, seperti pengolahan makanan dan minuman, serta industri farmasi.

Jumlah perusahaan pengolahan kakao juga mengalami peningkatan seiring dengan adanya kebijakan BK kakao dan hilirisasi industri kakao¹⁰. Di samping itu, dengan adanya program hilirisasi, pemerintah juga telah mendorong pembentukan unit-unit pengolahan biji kakao di sentra-sentra produksi kakao. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan wirausaha baru, baik skala kecil dan menengah. Sehingga diharapkan akan meningkatkan perekonomian petani, pelaku usaha

Kinerja industri pengolahan kakao di Indonesia

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Perusahaan	Unit Usaha	15	16	16	18	19
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	4.000	4.300	4.300	5.300	5.800
3	Jumlah Investasi	Juta USD	250	330	495	570	600
4	Kapasitas	Ribu Ton	345	560	660	735	765
5	Produksi	Ribu Ton	150	250	310	324	390
6	Utilitas	%	43	45	47	44	51
7	Ekspor						
	Biji Kakao	Ton	432.427	210.067	163.501	188.420	63.334
	Nilai	Ribu USD	1.190.739	614.496	384.829	446.094	196.492
	Kakao Olahan	Ton	103.055	178.951	196.480	196.333	242.206
	Nilai	Ribu USD	406.083	676.900	609.982	653.641	999.037
8	Impor						
	Biji Kakao	Ton	24.830	19.100	23.943	30.766	109.410
	Nilai	Ribu USD	89.497	62.881	62.977	77.422	341.437
	Kakao Olahan	Ton	13.851	15.400	13.338	18.480	14.269
	Nilai	Ribu USD	47.584	73.828	68.530	70.111	50.990

Sumber: BPS diolah (2014)

dan daerah. Hal tersebut tampak dari mulai bermunculannya merk-merk produk coklat baru yang diproduksi oleh industri skala kecil dan menengah, misalnya *Chocodot* dari Garut; *Cokelat Inyong* dari Banjarnegara; *Cokelat Adam* dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat; *Socolatte* dari Kabupaten Pidie Jaya, Aceh; *Cokelat Monggo* dari Yogyakarta; dan sebagainya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebijakan BK kakao telah berhasil mendorong hilirisasi di sektor industri kakao.



Sumber: google.com

Produk coklat produksi industri pengolahan kakao skala kecil dan menengah

Meningkatnya industri hilir pengolahan kakao dirasa juga perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi kakao di Indonesia. Hal ini dikarenakan saat ini rata-rata konsumsi coklat di Indonesia masih relative rendah, yaitu hanya berkisar 0,4–0,5 kg per kapita per tahun. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan angka konsumsi rata-rata penduduk di Asia seperti Malaysia dan Singapura yaitu 1 kg per kapita per tahun. Sedangkan, jika dibandingkan dengan negara-negara maju, seperti Swiss, angka konsumsi rata-rata coklat di Indonesia masih jauh lebih rendah yaitu mencapai 9,2 kg per kapita per tahun. Diprediksi oleh Euromonitor, konsumsi coklat di dalam negeri akan mengalami peningkatan rata-rata 5% dalam kurun waktu tahun 2014-2019¹¹). Dengan demikian, upaya peningkatan sektor hilir kakao perlu juga dibarengi dengan upaya peningkatan produksi biji kakao.

Penutup

Kebijakan Bea Keluar kakao (BK Kakao) merupakan salah satu kebijakan yang telah mendorong penerapan kebijakan hilirisasi industri kakao di Indonesia. Beberapa dampak kebijakan hilirisasi dan BK Kakao diantaranya yaitu

peningkatan jumlah industri kakao di Indonesia, munculnya unit-unit pengolahan biji kakao skala kecil dan menengah sehingga saat ini telah banyak dijumpai produk coklat merk lokal dan peningkatan konsumsi kakao di Indonesia. Oleh karena itu, harus diimbangi dengan kebijakan peningkatan produksi biji kakao, sehingga kebutuhan industri pengolahan kakao dalam negeri dapat terpenuhi.

Sumber Pustaka

- ¹Hanafi, R.U. (2015). Daya saing komoditas kakao Indonesia dalam perdagangan internasional. Sripsi Sarjana. Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- ²Hasibuan, A.M.; N. Rita & W. Agus (2012). Analisis kinerja dan daya saing perdagangan biji kakao dan produk kakao olahan Indonesia di pasar internasional. *Buletin RISTRI*, 3, 57–70.
- ³Arsyad, M. & Yusuf (2008). Assesing impact of oil prices and interest rate policies: The case of Indonesian cocoa. *Ryukoku Journal of Economic Studies*. 48, 65–92.
- ⁴Lubis, A.D. & S.Nuryati (2011). Analisis dampak ACFTA dan kebijakan perdagangan kakao di pasar domestik dan China. Analisis Kebijakan Pertanian 9, 143–156.
- ⁵Susilowati, S.H. (2007). Dampak kebijakan ekonomi di sektor agroindustri terhadap distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- ⁶Susilowati, S.H.; B.M. Sinaga; W.H. Limbong & Erwidodo (2007). Dampak kebijakan ekonomi di sektor agroindustri terhadap kemiskinan dan distribusi pendapatan rumah tangga di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 25, 11–36.
- ⁷Sundari, S. (2000). Analisis dampak agroindustri tebu terhadap peningkatan pendapatan petani dan pengembangan perekonomian wilayah di Jawa Timur. Tesis Magister Sains. Program pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- ⁸Winarti, C.; M.P. Laksamanahardja & D. Sumangat. (2005). Kajian status pengembangan agroindustri minyak nilam terhadap tingkat kepuasan petani di Majalengka. *Jurnal Pascapanen*, 2, 36–44.
- ⁹Syadullah, M. (2012). Dampak kebijakan Bea Keluar terhadap ekspor dan industri pengolahan kakao. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 6, 53-68.
- ¹⁰Media Industri (2010). Penerapan bea Keluar: Dorong industri hilir kakao domestik. Nomor 2.
- ¹¹BBIHP. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan. www.bbhip.go.id/web/berita/detail/45/dinas/konsumsi-cokelat-di-indonesia. diakses pada 12 Agustus 2017.

--o--